

**KEPENTINGAN INDONESIA DALAM KERJASAMA PEMANFAATAN RUANG
ANGKASA DENGAN TIONGKOK TAHUN 2015 – 2020**

***(THE INTEREST OF INDONESIA ON SPACE UTILIZATION COOPERATION WITH
TIONGKOK 2015 – 2020)***

SUKMA RAGA

20100510031

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas ISIPOL

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstrak

Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar didunia. Indonesia akan sangat membutuhkan suatu satelit yang dimana salah satu fungsinya untuk pengamanan wilayah. Teknologi antariksa merupakan bentuk tanggung jawab sebuah negara untuk membantu keamanan wilayah negara itu sendiri. Teknologi antariksa bisa berupa satelit yang akan memantau suatu objek dari ruang angkasa agar negara bisa mengetahui keadaan suatu objek tersebut. Tujuan penulisan apa kepentingan negara Indonesia bekerjasama dengan China, serta mengetahui faktor-faktor yang mendorong Indonesia melakukan kerjasama dengan China. Berdasarkan hasil analisa, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menjalin kerjasama dengan China sebagai negara dengan teknologi canggih yang ada didunia adalah agar Indonesia bisa memiliki teknologi antariksa yang bisa menjaga dan mengamankan keamanan negara dan bisa bersaing dengan negara-negara maju lainnya dikancah internasional dalam bidang antariksa.

Keywords: Indonesia, China, Teknologi antariksa, Kerjasama

Abstract

Indonesia is the largest archipelago country in the world. It requires a satellite in which one of the functions is to assure the security on its area. Space technology becomes one of state responsibilities in order to manage its own security. Space technology can be in a form of satellite which would monitor space objects so the state could determine the object. The purpose of this study is to understand Indonesia's interests in establishing cooperation with China, as well as to possess knowledge upon its driving forces behind. Based on the analysis, it can be concluded that Indonesia chose to cooperate with China, as one of the states with most advanced technology, in the aim to possess space technology which would enable it to keep and ensure state security and can compete with another developed country in International space technology area.

Keywords: Indonesia, China, Space Technology, Cooperation

Pendahuluan

Hubungan Internasional saat ini tidak hanya membahas tentang isu ekonomi ataupun penyelamatan lingkungan, tetapi diantara itu semua, beberapa negara sedang fokus dalam bidang antariksa, bahkan negara-negara maju telah berhasil mendaratkan putra-putri bangsanya ke antariksa. Teknologi antariksa tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk penelitian dan eksplorasi tetapi juga penciptaan teknologi yang terkait dengan penginderaan bumi seperti halnya satelit yang mempunyai berbagai kelebihan dalam hal mengusahakan perdamaian dunia bahkan satelit bisa jadi menjadi alat untuk memecah belah dunia. Satelit dengan segala kecanggihan yang dimiliki sangat dibutuhkan sebuah negara untuk pengembangan pendidikan dan penelitian, pengawasan dan pengamanan wilayah negara, media, komunikasi dan lain-lain.¹

Negara-negara maju sudah melakukan penelitian maupun peluncuran satelit sejak lama. Peluncuran pertama satelit dilakukan oleh Uni Soviet pada 1957. Peluncuran tersebut menandakan awal dari pengembangan teknologi antariksa dunia dan peluncuran selanjutnya disusul Amerika pada tahun 1958. Negara berkembang sebagian besar melihat kegiatan peluncuran ini sebagai

¹ <http://www.pojokpedia.com/beberapa-jenis-satelit-buatan-dan-fungsinya.html> (Diakses pada 05 Mei 2015)

persaingan kedua belah pihak untuk penguasaan dan perebutan pengaruh ideologinya. Masyarakat Internasional melihat sensitifitas dari sejarah peluncuran yang bertepatan setelah selesainya perang dingin dan didominasi oleh dua kutub pusat kekuatan dunia tersebut.²

Persaingan kekuatan diantariksa oleh U.S dan Rusia memicu negara lain untuk ikut mengembangkan teknologi antariksa. Uni Eropa bahkan mampu mengembangkan teknologi antariksanya dengan pesat mengikuti kemampuan yang dimiliki oleh Amerika dan Rusia. Kemampuan yang dimiliki satelit ataupun teknologi lain yang beredar diantariksa sedikit banyak mempengaruhi hubungan antar negara. Setiap negara yang meluncurkan teknologinya ke antariksa cenderung dipandang oleh negara-negara lain. Sebagian negara akan memandang positif dan sebagian lain akan memandang negatif.

Indonesia memiliki keadaan politik yang sangat dinamis, serta banyak sekali hal-hal yang harus dirahasiakan dari pihak-pihak di luar Indonesia. Keadaan seperti ini membutuhkan sistem komunikasi dan keamanan yang tinggi.³ Saat ini Indonesia menggunakan sandi-sandi dalam komunikasi keamanannya tetapi ini tidak cukup karena masih banyak celah yang bisa ditembus oleh pihak-pihak yang ingin membobol rahasia yang dimiliki Indonesia. Indonesia memiliki keadaan geografi yang membutuhkan pencitraan dari antariksa. Indonesia memiliki banyak wilayah yang belum terjamah oleh manusia dan negara harus memetakan keadaan seperti ini untuk mengamankan wilayah kedaulatannya. Indonesia juga memiliki wilayah maritime yang sangat luas dengan lalu lintas kapal dagang yang cukup padat, pengamanan maksimal dapat dicapai dengan teknologi antariksa yang efektif dan efisien.

² <http://history.nasa.gov/sputnik/> (Diakses pada 05 Mei 2015)

³ <http://komunikasi.us/index.php/course/perkembangan-teknologi-komunikasi/87-alexander-aji-wicaksono-b-2> (Diakses pada 05 Mei 2015)

Tiongkok menawarkan sebuah kerjasama dalam pemanfaatan ruang angkasa dengan tujuan positif terhadap Indonesia. Tiongkok menawarkan pengenalan teknologi-teknologi luar angkasanya terhadap peneliti LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) Indonesia. Tiongkok meyakinkan Indonesia merupakan negara dengan potensi besar untuk menjadi mitra Tiongkok dalam bidang pengembangan teknologi antariksa. Tiongkok saat ini termasuk dalam lima besar negara dengan penguasaan teknologi antariksa terbaik dibawah Amerika Serikat, Russia, Eropa dan Jerman. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi Indonesia yang saat ini membutuhkan “guru” untuk memajukan teknologi antariksanya.⁴

Tiongkok sebagai negara besar dan kemampuan antariksa yang maju dengan pesat menawarkan kerjasama penelitian dengan Indonesia. Penawaran yang terbuka lebar ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memulai edisi baru dalam pengembangan teknologi antariksanya melalui LAPAN. Kerjasama yang dijalin diharapkan saling memberi manfaat yang positif dan saling memenuhi kepentingan masing-masing negara.⁵

Dari penjelasan diatas, maka rumusan pertanyaan penelitian adalah “Apa kepentingan pemerintah Indonesia bekerjasama dengan pemerintah Tiongkok mengenai eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa dalam maksud damai?”

Hasil Penelitian

Untuk menjelaskan masalah diatas, penulis menggunakan konsep Kerjasama dan Model Aktor Rasional. Istilah kerjasama (*collaboration*), dapat memunculkan satu citra akan suatu organisasi internasional yang bekerja keras menyelesaikan masalah-masalah biasa, atau ahli-ahli

⁴ <http://us.m.news.viva.co.id/news/read/433560-Tiongkok-siap-wujudkan-impian-indonesia-kirim-astronot> (Diakses pada 05 Mei 2015)

⁵ <http://jakartagreater.com/tiongkok-siap-bantu-jokowi-usd-40-miliar-untuk-wujudkan-poros-maritim/> (Diakses pada 05 Mei 2015)

teknis dalam lapangan yang membantu pihak lain meningkatkan produktivitas. Bila kita menggunakan istilah konflik, mungkin akan diartikan segi kekerasan atau ketidaksepakatan mengenai isu tertentu. Apapun pengertian bersama kita mengenai masalah ini, kita sering menganggap bahwa kerjasama dan konflik adalah berlawanan dan bahwa politik internasional (sering didefinisikan sebagai pencarian kekuasaan dengan pengorbanan pihak lain) pada dasarnya adalah suatu proses yang penuh konflik⁶

Kerjasama dapat terjadi dalam konteks yang berbeda. Kebanyakan transaksi dan interaksi kerjasama terjadi secara langsung diantara dua negara yang menghadapi masalah atau hal tertentu yang mengandung kepentingan bersama.⁷

Model aktor rasional adalah salah satu model proses pembuatan keputusan politik luar negeri suatu negara. Dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintahan yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan.⁸ Pemerintahan yang monolit ditafsirkan oleh penulis sebagai pemerintahan suatu negara yang mempunyai dasar negara kuat, pemerintahan yang solit dan mempunyai kepentingan nasional yang mendapat persetujuan rakyatnya. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya, dan perhitungan untung rugi atas masing-masing alternatif itu.

⁶ K. J. Holsti, "Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisa", Edisi Keempat, Jilid Kedua, alih bahasa : M. Tahir Azhary, Erlangga, Jakarta 1988, hal.209

⁷ Ibid

⁸ Mohtar Mas'ood, Ilmu Hubungan Internasional "Disiplin dan Metodologi" (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia,1990), hal. 235.

Tiongkok menawarkan kerjasama dengan sistem “win-win solution”. Tiongkok memastikan Indonesia akan mendapat ilmu dan manfaat dalam kerjasama tersebut. Kepentingan nasional masing-masing negara hanya diketahui oleh masing-masing pihak dengan penawaran manfaat yang dapat dinegosiasikan semaksimal mungkin oleh pemegang kepentingan terhadap mitranya. Kemitraan yang dilakukan Tiongkok dan Indonesia menjanjikan pemenuhan kepentingan nasional masing-masing negara dan hal ini menjadi pertimbangan nantinya bagi masing-masing pemerintah negara untuk mengkaji ulang terhadap kelanjutan kerjasama tersebut. Pengkajian ini biasanya dilakukan sebelum masa kerjasama tersebut akan berakhir.⁹

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDONESIA MENJALIN KERJASAMA KEANTARIKSAAN DENGAN TIONGKOK

Kemajuan akan ilmu pengetahuan dan teknologi negara Tiongkok dibidang antariksa jadi salah satu potensi besar negara tersebut untuk dapat menarik mitra aliansi. Indonesia yang merupakan negara dengan teknologi masih jauh dibawah Tiongkok melihat potensi besar dari negara Tiongkok tersebut yang mana kemajuan teknologi antariksanya setara dengan negara Amerika dan Rusia. Sehingga, adanya potensi besar itu membuat Indonesia ingin menajalin kerjasama untuk dapat mengembangkan teknologi antariksa Indonesia. Langkah awal yang diambil oleh Indonesia dalam kerjasama tersebut adalah dengan ikut andil menandatangani *Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO)*.

Pada tahun 1992, Tiongkok membentuk organisasi *Asia Pacific Multilateral Cooperation in Space Technology and Applications (APMCSTA)* yang merupakan langkah awal terbentuknya *Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO)*. Pada tanggal 28 Oktober 2005 APSCO

⁹ <http://www.tempo.co/read/news/2013/09/19/078515014/Indonesia-Cina-Kerjasama-Pertahanan-dan-Antariksa>
(Diakses pada 05 Mei 2015)

resmi ditanda tangani oleh 8 negara yaitu Tiongkok, Indonesia, Bangladesh, Iran, Mongolia, Pakistan, Peru dan Thailand. APSCO juga sebagai alat Tiongkok dalam kepentingan memperluas wilayah pengaruhnya (*sphere of influences Tiongkok*) di lingkup internasional dengan mengandalkan teknologi antariksa.

A. Tiongkok Sebagai Negara Besar yang Dapat Mengembangkan Teknologi Antariksa dalam Waktu Cukup Singkat

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini Tiongkok telah muncul sebagai kekuatan baru di regional dan perubahan perilaku Tiongkok ini secara fundamental membawa perubahan dalam hubungan internasional dimana akan memaksa aktor negara bangsa untuk mengubah agenda politik luar negerinya, tidak terkecuali Indonesia yang melihat hubungan dengan Tiongkok tidak lagi dipenuhi oleh persoalan-persoalan ideologi di masa lalu. Pertimbangan ideologi saat ini telah mengalami pergeseran yang signifikan dikalahkan oleh pertimbangan pragmatis yaitu Tiongkok sebagai kekuatan baru di dunia sangat berperan dalam menciptakan sebuah tatanan regional yang dikehendaki oleh para pemimpin Tiongkok.

Proses pengembangan teknologi yang dilakukan oleh Tiongkok selama ini dapat dikategorikan sebagai pengembang teknologi antariksa yang sangat efisien. Proses ini patut dicontoh oleh Indonesia karena saat ini negara berkembang seperti India, Pakistan, Malaysia dan lain-lain sudah mampu menciptakan beberapa part bahkan hampir seratus persen teknologi antariksanya.

Kebutuhan yang sangat mendesak bagi Indonesia adalah untuk pemenuhan kebutuhan negaranya sendiri karena luas dan besarnya aspek geografi yang dimiliki. Tiongkok yang secara terbuka menawarkan kerjasama dalam hal ini sepatutnya ditanggapi dengan bijaksana. Proses

kerjasama yang saling menguntungkan dan lepas dari kepentingan lain selain untuk tujuan damai dan pengembangan ilmu keantariksaan.

B. Peningkatan Posisi Tawar Indonesia dalam Politik Internasional

Kerjasama Indonesia dengan Pemerintah Tiongkok tersebut akan berpengaruh pada posisi Indonesia sebagai negara maritime dan kepulauan yang besar tentunya akan mengundang ketertarikan pihak lain atau negara lain. Ketertarikan tersebut dilihat dari sisi peran Indonesia sebagai individu negara atau dengan melihat keterlibatan peran Indonesia dalam organisasi-organisasi kerjasama multilateral. Tentu saja hal ini menarik Tiongkok sebagai kekuatan baru di asia pasifik atau dapat juga disebut dengan *regional power*, yang sangat berkepentingan untuk melibatkan Indonesia menjadi bagian dari *grand strategi* Tiongkok di Asia Tenggara. Konsekuensi yang akan dihadapi Indonesia adalah potensi keamanan dan kedaulatan Indonesia dimasuki oleh Tiongkok yang bisa mengakibatkan Tiongkok bisa dengan bebas mengawasi wilayah perairan Indonesia.

Keputusan Indonesia untuk bekerjasama dengan Tiongkok tentunya ada keuntungan yang akan didapatkan oleh Indonesia. Tidak hanya teknologi saja yang didapat tetapi ada keuntungan-keuntungan yang lain yang didapatkan Indonesia. Keuntungan tersebut seperti, Indonesia akan mendapatkan kesejahteraan dan ketahanan bangsa dan negara melalui pemanfaatan atas ruang udara dan ruang antariksa yang didasari oleh konsepsi Wawasan Nusantara dimana wilayah nasional dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan dan ketahanan bangsa dan negara tersebut.

C. Indonesia akan Lebih Cepat Ikut Andil Dalam Organisasi Antariksa Dunia

Kerjasama yang ditawarkan Tiongkok ini sangat jelas bisa menguntungkan Indonesia dan juga Tiongkok. Dimana negara-negara yang memiliki teknologi antariksa yang sangat maju sudah tertutup untuk melakukan kerjasama dengan Indonesia. Sedangkan Tiongkok sangat terbuka karena mereka memiliki kepentingan dan Indonesia sangat beruntung bisa meningkatkan teknologi antariksa agar bisa bersaing dengan negara-negara asia lainnya dan juga untuk menjaga keamanan wilayah dan kedaulatan negara Indonesia sendiri.

Kerjasama dengan Tiongkok sebagai anggota tetap dalam *Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO)* akan membantu Indonesia menjadi anggota tetap dalam *Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO)*. Karena saat ini Indonesia belum menjadi anggota tetap dalam APSCO. Dengan berjalannya kerjasama ini, Indonesia akan mendapatkan aliansi strategis dengan bergabung menjadi anggota tetap *Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO)*. Karena teknologi antariksa Indonesia akan meningkat pesat dan bisa bersaing dengan negara-negara lainnya.

Namun kerjasama ini juga harus dilandasi oleh prinsip-prinsip *space treaty*. Dengan peluncuran Sputnik I pada 4 oktober 1957, sejarah memasuki Abad Ruang Angkasa (*Space Age*). Sejak itu terjadilah kegiatan pada dataran internasional, terutama lewat forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk menciptakan hukum internasional yang bisa dijadikan sebagai kerangka normative bagi kegiatan negara-negara di ruang angkasa. Tanpa tatanan norma sedemikian, dikhawatirkan ruang angkasa akan menjadi ajang konflik kepentingan antar bangsa, khususnya antara dua negara adi kuasa yang saling berebut pengaruh politik dan militer, Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Latar belakang kekhawatiran tersebut memberi ciri yang kuat pada perjanjian internasional yang kemudian lahir pada tanggal 27 januari 1967, yang dinamakan *Treaty of Principles governing*

the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies. Perjanjian internasional yang dikenal dengan nama singkat Perjanjian Ruang Angkasa (*Space Treaty*) tersebut kemudian diakui sebagai perjanjian induk yang memuat prinsip-prinsip utama guna mengatur kegiatan keantariksaan, dan menjadi rujukan dasar bagi perjanjian-perjanjian internasional di bidang keantariksaan selanjutnya. Oleh karena itu banyak ahli menanamkan perjanjian tersebut sebagai *Magna Carta* keantariksaan.¹⁰

Prinsip-prinsip yang bersifat umum yang diletakkan di dalam *Space Treaty* adalah:¹¹

1. Prinsip non-diskriminasi, yaitu bahwa antariksa, termasuk bulan dan benda langit lainnya, harus dimanfaatkan untuk kepentingan semua bangsa, tanpa membedakan tingkat ekonomi dan teknologi diantara mereka.
2. Prinsip persamaan (*equality*), yaitu bahwa antariksa, termasuk bulan dan benda langit lainnya, dinyatakan bebas untuk dimanfaatkan oleh setiap negara atas dasar persamaan.
3. Prinsip kerja sama, yaitu bahwa kerjasama antar negara harus melandasi kebebasan untuk melakukan penelitian ilmiah atas antariksa, termasuk bulan dan benda langit lainnya.

Dari prinsip *Space Treaty* diatas yang sudah memuat perjanjian untuk kegunaan antariksa, Indonesia menjalin kerjasama dengan Tiongkok bertujuan untuk mempelajari dan mengembangkan teknologi antariksa yang Tiongkok miliki untuk keperluan damai dan kepentingan suatu negara untuk keamanan wilayah maupun kedaulatan negaranya sendiri.

¹⁰ *Loc. Cit*, Yasidi Hambali, hal.58

¹¹ *Ibid*, hal.60

KESIMPULAN

Hubungan kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Tiongkok sudah dimulai sejak penandatanganan *MoU* (Nota Kesepakatan) oleh kedua perwakilan ditahun 2013. Presiden SBY dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menyaksikan langsung penandatanganan nota kesepakatan tersebut. Ditahun 2015 pada masa awal pemerintahan Jokowi, beliau langsung menginstruksikan untuk segera bekerja melakukan peningkatan teknologi antariksa dengan Tiongkok. Pada pertemuan Pertama Komite Bersama kerjasama di bidang antariksa tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan perjanjian antara Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dan Pemerintah Republik Indonesia di bidang kerjasama eksplorasi dan pemanfaatan antariksa untuk maksud damai.

Didalam kerjasama dibidang antariksa tersebut, pemerintah Indonesia memiliki Kepentingan demi meningkatkan kualitas teknologi antariksa yang kini dimiliki Indonesia. Kepentingan Indonesia berupa :

1. Indonesia mendapatkan alih teknologi yang sangat banyak yang dimiliki oleh Tiongkok karena Indonesia dan Tiongkok akan melakukan kerjasama dalam 11 bidang yang mana teknologi tersebut hanya dimiliki oleh negara-negara maju saja. Bentuk kerjasama ini menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas teknologi antariksa Indonesia sendiri. Cita-cita Indonesia sendiri yaitu bisa meluncurkan roket sendiri dan dari badan antariksa Indonesia sendiri yaitu LAPAN.
2. Indonesia berkepentingan menjalin aliansi strategis dengan melakukan kerjasama ini. Indonesia akan meningkatkan level teknologinya untuk bersaing dan bisa sejajar dengan negara-negara lainnya. Hal ini akan

sangat menguntungkan indonesia agar keamanan wilayah dan rahasia negara Republik indonesia bisa terpantau dan terjaga secara aman.

Tiongkok sebagai negara super power dibidang antariksa bisa menyaingi negara Amerika dan Rusia sangat terbuka untuk melakukan kerjasama teknologi antariksa dengan Indonesia walaupun disatu sisi Tiongkok memiliki kepentingan negaranya sendiri dengan Indonesia. Akan tetapi hal ini sangat menguntungkan bagi Indonesia itu sendiri.

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh indonesia tersebut telah direspon baik oleh Tiongkok. Indonesia sangat beruntung kedepannya akan bisa membuat dan meluncurkan teknologi satelit terutama teknologi dibidang Raket. Pada setiap program yang dilakukan oleh LAPAN untuk mengembangkan teknologi antariksa ini sangat didukung oleh pemerintah dan presiden dan diharapkan akan dengan lancar.

Daftar Pustaka

<http://www.pojokpedia.com/beberapa-jenis-satelit-buatan-dan-fungsinya.html> (Diakses pada 05 Mei 2015)

<http://history.nasa.gov/sputnik/> (Diakses pada 05 Mei 2015)

<http://komunikasi.us/index.php/course/perkembangan-teknologi-komunikasi/87-alexander-aji-wicaksono-b-2> (Diakses pada 05 Mei 2015)

Holsti, K. J. 1988. *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisa*. Edisi Keempat. Jilid Kedua. Diterjemahkan Oleh : M. Tahir Azhary. Erlangga

Mas'ood, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional "Disiplin dan Metodologi"*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.

<http://www.tempo.co/read/news/2013/09/19/078515014/Indonesia-Cina-Kerjasama-Pertahanan-dan-Antariksa> (Diakses pada 05 Mei 2015)